

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Rasionalitas Birokrasi dalam Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Pembagian kerja** di Kecamatan Sumberrejo telah dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi masing-masing ASN. Pembagian tugas yang jelas memudahkan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sesuai tanggung jawabnya sehingga mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Namun demikian, pada kondisi tertentu masih ditemukan kerja sama lintas bidang ketika volume pekerjaan meningkat sehingga menunjukkan bahwa pemerataan beban kerja masih perlu terus dioptimalkan.
2. **Hierarki otoritas** telah diterapkan melalui struktur organisasi yang jelas serta adanya garis komando yang berjalan sesuai jenjang kewenangan. Proses koordinasi antara Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, dan ASN pelaksana berlangsung secara berjenjang melalui rapat koordinasi, briefing, disposisi surat, maupun komunikasi langsung sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan dapat berjalan secara efektif.
3. **Sistem aturan formal** telah diterapkan melalui keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam penyelenggaraan

pelayanan publik. ASN melaksanakan tugas sesuai prosedur yang berlaku, sedangkan masyarakat memperoleh kepastian mengenai persyaratan dan alur pelayanan. Pengawasan terhadap pelaksanaan SOP juga dilakukan secara berkala sehingga mampu mendukung pelayanan yang tertib, transparan, dan akuntabel.

4. **Keahlian teknis ASN** menunjukkan bahwa sebagian besar ASN telah memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan serta memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas. Kemampuan teknis ASN juga tercermin dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, meskipun peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas masih perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mampu menyesuaikan perkembangan teknologi dan kebutuhan pelayanan publik.
5. **Sistem karier berbasis merit** telah diterapkan melalui penempatan ASN yang mempertimbangkan kompetensi, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, serta kebutuhan organisasi. Selain itu, pengembangan kompetensi dan promosi jabatan telah mengacu pada penilaian kinerja serta ketentuan kepegawaian yang berlaku sehingga mendukung terciptanya profesionalisme ASN yang lebih objektif dan akuntabel.
6. **Dokumentasi tertulis** telah dilaksanakan melalui sistem pencatatan administrasi, pengelolaan arsip pelayanan, laporan kegiatan, serta dokumentasi elektronik yang tertib. Dokumentasi tersebut mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, mempermudah proses

evaluasi dan pengambilan keputusan, serta memberikan kepastian administrasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, pengembangan sistem dokumentasi berbasis digital masih perlu terus ditingkatkan agar lebih efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa rasionalitas birokrasi dalam meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro telah diterapkan dengan cukup baik. Keenam indikator teori rasionalitas birokrasi Max Weber, yaitu pembagian kerja, hierarki otoritas, sistem aturan formal, keahlian teknis, sistem karier berbasis merit, dan dokumentasi tertulis, telah mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, dan akuntabel. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan, terutama dalam pemerataan beban kerja, pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan, penguatan penerapan sistem merit, serta optimalisasi digitalisasi administrasi dan pengelolaan arsip agar profesionalisme ASN dan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dapat terus meningkat sesuai dengan prinsip birokrasi rasional yang dikemukakan oleh Max Weber.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Analisis Rasionalitas Birokrasi dalam Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) di*

Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro

Kecamatan Sumberrejo diharapkan dapat terus meningkatkan penerapan prinsip-prinsip rasionalitas birokrasi, khususnya dalam aspek pembagian kerja, penguatan koordinasi antarbidang, serta optimalisasi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara konsisten. Selain itu, evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi setiap ASN perlu dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa seluruh pegawai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, serta kewenangan yang telah ditetapkan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas organisasi dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

2. Bagi Aparatur Sipil Negara Kecamatan Sumberrejo

Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Sumberrejo diharapkan senantiasa meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, maupun kegiatan pengembangan kompetensi lainnya. Selain itu, ASN diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan administrasi, serta pelayanan publik sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip birokrasi rasional.

3. Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui perangkat daerah yang membidangi pengelolaan kepegawaian diharapkan dapat terus memperkuat penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN, terutama dalam proses penempatan, pengembangan kompetensi, serta promosi jabatan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai. Selain itu, diperlukan dukungan terhadap pengembangan sistem administrasi dan kearsipan berbasis digital sebagai upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada analisis rasionalitas birokrasi dalam meningkatkan profesionalisme ASN di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan teori Rasionalitas Birokrasi Max Weber. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan menggunakan teori, pendekatan, atau metode yang berbeda, serta memperluas lokasi penelitian pada perangkat daerah atau kecamatan lain sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan rasionalitas birokrasi dalam meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dwiyanto, A. (2011). *Manajemen pelayanan publik: Peduli, inklusif, dan kolaboratif*. Gadjah Mada University Press.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Miles, M. B., Michael Huberman, A., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis. A methods sourcebook* (3rd ed). SAGE Publications Inc.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2020). *Struktur birokrasi dan efektivitas pelayanan publik di tingkat kecamatan*. Prenadamedia Group.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia tahun 2023*. Ombudsman Republik Indonesia.
- Pasolong, H. (2019). *Teori administrasi publik*. Alfabeta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sedarmayanti. (2017). *Manajemen sumber daya manusia: Reformasi birokrasi dan manajemen pegawai negeri sipil*. PT Refika Aditama.
- Sinambela, L. P. (2016). *Reformasi pelayanan publik: Teori, kebijakan, dan implementasi*. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian administrasi*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Waldo, D. (1948). *The administrative state: A study of the political theory of American public administration*. Ronald Press Company.

Weber, M. (1922). *Economy and society: An outline of interpretive sociology*. University of California Press.

Wibowo. (2018). *Manajemen kinerja*. Rajawali Pers.

Widodo, J. (2011). *Good governance: Telaah dari dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah*. Insan Cendekia.

